



Judul : Karya insan pers harus dilindungi
Tanggal : Jumat, 11 Februari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 9

9

REPUBLIKA | JUMAT, 11 FEBRUARI 2022

'Karya Insan Pers Harus Dilindungi'

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Usulan Dewan Pers dan insan media terkait pembentukan regulasi *publisher rights* atau hak cipta jurnalistik disambut baik kalangan legislator. Regulasi tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menilai, usulan regulasi *publisher rights* penting untuk diperhatikan para pemangku kepentingan.

"Karena di era digital saat ini, karya-karya dari insan pers perlu perlindungan hukum," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2).

Dasco mengatakan, DPR siap menampung usulan dari Dewan Pers ataupun pemerintah terkait hak publikasi. Dengan demikian, menurut dia, ada peluang usulan tersebut dapat menjadi rancangan undang-undang (RUU) terkait *publisher rights* untuk pers.

"Nanti kita akan lihat, apakah jadi usulan pemerintah atau DPR. Mungkin akan kita buat sebuah RUU tentang perlindungan tersebut," ujar Dasco.

Draf usulan regulasi *publisher rights* disusun Dewan Pers bersama asosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability. Draf regulasi berjudul "Usulan Jurnalisisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Platform Digital" tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Kominfo pada 19 Oktober 2021.

Regulasi *publisher rights* diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan, seperti monetisasi dan agregasi berita tanpa kompensasi memadai, serta pengabaian hak cipta jurnalistik.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsuet) menyatakan, mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan menghadirkan aturan mengenai *publisher rights* untuk menciptakan ekosistem digital dengan kompetisi yang adil. Bam-

soet mengatakan, Presiden dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada Rabu (9/2), menawarkan ketentuan *publisher rights* bisa diatur dalam tiga pilihan, yaitu melalui revisi undang-undang, undang-undang baru, atau peraturan pemerintah. "Presiden Jokowi juga mengajak insan pers untuk ikut memilih pilihan mana yang paling baik untuk diambil," katanya.

Bamsuet menjelaskan, kompetisi digital yang adil antara pers dan platform digital global, seperti *Google, Facebook, Youtube, Twitter*, dan lainnya sangat dibutuhkan. Hal ini agar bisa memperkuat pers nasional yang bukan hanya sehat secara ketentuan jurnalistik, melainkan sehat secara ekonomi. "Ini juga mencegah terjadinya digital feodalisme," ujarnya.

Dia menjelaskan, berbagai negara sudah merancang regulasi *publisher rights*, di antaranya Australia yang telah mengesahkan *News Media Bargaining Code*, serta Korea Selatan yang baru saja menerapkan amendemen undang-undang bisnis telekomunikasi, *Telecommunication Business Act*.

Bamsuet mengatakan, kedua peraturan tersebut mendukung media massa di tengah disrupsi teknologi. Ia mencontohkan, regulasi *News Media Bargaining Code* membuat perusahaan media massa di Australia bisa bernegosiasi terkait harga untuk konten mereka yang dimuat di platform digital global. "Regulasi tersebut memberikan waktu dua bulan untuk mencapai kesepakatan harga, jika tidak terjadi kesepakatan, pemerintah akan menunjuk wasit," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, akan terus mendorong realisasi regulasi *publisher rights*. Menurut Presiden, ekosistem industri pers harus ditata agar tercipta iklim kompetisi yang lebih seimbang di antara media-media arus utama dengan platform digital asing.

■ antara ed: satna kartika yudha